



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bageko@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor : 005 / / 413.034/2024

Lamongan, April 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko Tahun 2023 Bagian
Perekonomian Setda Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

Kab. Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2023 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

NURUL MUKMININ, SE, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741101 199402 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

TRIBUNAN I



BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bageko@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / / 413.021/ 2024
TANGGAL TERBIT	:	April 2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Pelaporan <u>ANIK FAHZUNI.SE,</u> Penata Tingkat . I NIP. 19760810 200901 2 002
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian <u>ARIP ROHMAN SOLEH. SP</u> Penata Tingkat I NIP. 19850409 201001 1 013
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah <u>NURUL MUKMININ, SE, MM.</u> Pembina NIP. 19731208 200312 2 004

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Perekonomian mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Perekonomian mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Perekonomian demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Perekonomian, selain itu Bagian Perekonomian juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Perekonomian.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Perekonomian. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Perekonomian telah menyusun penilaian resiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Perekonomian tahun 2023 untuk mempercepat implementasi monitoring dan evaluasi SPIP di Lingkup Bagian Perekonomian pada khususnya dan Lingkup Sekretariat Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kousioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Perekonomian bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Perekonomian berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian, Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Perekonomian dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Perekonomian memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam bidang perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah, penetapan ini berdasarkan tuis yang diemban Bagian Perekonomian.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Perekonomian, antara lain :

**Tabel B.1 Indentifikasi Risiko
Bagian Perekonomian**

No	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
1	Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kurang dari target	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kurang target	RSO.24.02.02.7.70	Bagian Perekonomian	Internal	Internal	C	Kurangnya capaian indikator kinerja	OPD dan Masyarakat

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Bagian Perekonomian, antara lain :

**Tabel C.1 Analisis Risiko
Bagian Perekonomian**

No	Entitas	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Skala Resiko	Pemilik resiko	Penyebab	Dampak
Resiko Strategis OPD							
1	Bagian Perekonomian	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah kurang dari target	RSO.23.02.02.7.70	2	Bagian Perekonomian	Internal	Kurangnya capaian indicator kinerja
Resiko Operasional OPD							
1	Bagian Perekonomian	OPD terkait kurang memahami permasalahan bidang Perekonomian	ROO.23.02.02.7.70	2	Bagian Perekonomian	Eksternal staf/pejabat OPD yang hadir melaksanakan tindakan lanjut	Kurang maksimalnya capaian kegiatan

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Perekonomian, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM Bagian Perekonomian.
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Perekonomian, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah:							
1	Menjaga performa kinerja organisasi	tatap muka langsung, zoom	Kabag Perekonomian	Jajaran Kasubag	Januari - juni	Telah dilaksanakan	0 % resiko
Risiko Operasional OPD Bagian Perekonomiann Sekretariat Daerah:							
1	Mengupayakan /mengkomunikasikan dan mengkoordinasi dengan pejabat yang menangani urusan lingkup dibagian Perekonomian	tatap muka langsungdan mengkoordinasikan secara pribadi maupun grup menggunakan Whatsap	Kasubag Perekonomian	OPD Lain	Januari- Juni	Telah dilaksanakan	0 % resiko

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Bagian Perekonomian, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan dan menjaga performa kinerja	Metode pemantauan kepala OPD dan Ispektorat	Kabag Perekonomian	Januari - desember	januari -Juni	Telah terlaksana
Risiko Operasional OPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan dan mengkomunikasikan serta mengkoordinasi dengan pejabat yang menangani urusan lingkup bagian perekonomian	Metode pemantauan internal	Kabag Perekonomian	Januari - desember	januari -Juni	Telah terlaksana

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada tahun 2023, dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Perekonomian dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.